

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Otonomi daerah diberlakukan sebagai bentuk perubahan sistem penyelenggaraan pemerintah daerah dari sentralisasi ke desentralisasi. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban suatu daerah yang bertujuan untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan dalam pemerintahan daerah daerah itu sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berlakunya setiap otonomi daerah dalam suatu daerah maka pengelolaan keuangan dalam pemerintahan daerah tersebut sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk tertib, transparan, dan akuntabel yang berguna untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan adil. Salah satu upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari tidakan jahat dan kecurangan maka pemerintah daerah diwajibkan menegaskan penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang baik dan jujur.

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan pemerintahan yaitu: masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, mereka adalah yang berperan dalam suatu tahapan investasi, pinjaman dan donasi, investasi, serta pihak pemerintah (Ikriyati & Aprilia, 2019). Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 mengungkapkan bahwa suatu prasyarat normatif untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang berkarakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Relevan yaitu informasi keuangan yang telah dibuat dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Andal yaitu menyajikan setiap fakta yang jujur, serta dapat diverifikasi. Dapat dibandingkan memiliki artian yaitu dapat membandingkan antara laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Dapat

dipahami dalam artian dapat dimengerti oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud (Fauziyah, 2019).

Kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang sangat benar dan jujur yang dapat membantu pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi (Mahayani et al., 2017). Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik kualitas laporan keuangan pemerintah sangat penting karena memberikan manfaat dalam upaya mengambil suatu kebijakan pemerintahan dimasa yang akan datang. Apabila laporan keuangan sudah dapat memberikan manfaat dalam membuat suatu keputusan maka akan sangat mendorong percepatan pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Kualitas laporan keuangan pemerintah dipengaruhi oleh adanya ketersediaan kelengkapan laporan keuangan tersebut yaitu: laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, dimana yang penyajiannya berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

UU Nomor 17 Tahun 2003, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah, sehingga standar akuntansi pemerintah ini merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia (Rahmawati et al., 2018). SAP mewajibkan setiap entitas pelaporan termasuk pemerintah daerah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antara generasi dan evaluasi kinerja (Putri et al., 2016). Melalui penerapan Standar akuntansi Pemerintahan (SAP) ini akan dapat disusun laporan keuangan yang berguna dan berkualitas bagi para pengguna laporan keuangan tersebut. Kegunaan laporan keuangan akan ditentukan oleh isi informasi yang telah disajikan dalam laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan harus disusun berpedoman pada standar

akuntansi pemerintahan agar laporan keuangan berisi informasi yang sangat bermakna.

Faktor lain untuk menciptakan suatu laporan keuangan yang berkualitas adalah pengaruh akan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi yang dimaksud adalah penggunaan aplikasi komputer akuntansi pada pengelolaan keuangan pemerintah dan daerah (Nadir & Hasyim, 2017). Dalam PP No. 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah mengatur tentang kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah pusat dan daerah. Pemanfaatan teknologi informasi salah satu komponen yang mempengaruhi suatu organisasi pemerintah yang paling kompleks terutama bagi para pengambil keputusan dalam organisasi, guna mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif (Rahmawati et al., 2018). Secara umum, manfaat dari suatu teknologi informasi antara lain yaitu: kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, biaya pemrosesan yang lebih rendah, kemampuan *multiprocessing* (Wahana Komputer, 2003 dalam Pebriani, 2019).

Penerapan pemanfaatan teknologi informasi sangat membantu dalam pengelolaan laporan keuangan secara efektif dan efisien serta menjamin keterbentukan kualitas laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Menurut Wilkinson et al (2000) dan Hamzah (2009) dalam Rasyidah dan Hasyim (2017) pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal komputer, perangkat lunak, database, jaringan, *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi informasi. Lanjutnya, menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi mencakup adanya (a) pengolahan data informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat. Oleh karena itu, teknologi informasi perlu dimanfaatkan secara optimal mungkin dalam halnya penggunaan komputer, pemakaian jaringan internet, serta meminimalisir penggunaan biaya agar tidak terbuang sia-sia sehingga dapat mendukung pembentukan dan penyajian laporan keuangan.

Selain wajibnya pemanfaatan informasi teknologi, perlu adanya dukungan sistem pengendalian internal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya suatu tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan dalam pelaporan keuangan, pengamanan terhadap aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Rahmawati et al., 2018). Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) menyebutkan bahwa pengendalian internal meliputi berbagai kebijakan yaitu terkait dengan catatan keuangan dengan memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, serta penerimaan dan pengeluaran telah sesuai dengan otorisasi yang memadai, memberikan keyakinan yang memadai atas keamanan aset yang berdampak material pada laporan keuangan pemerintah (Hardyansyah, 2017). Oleh karena itu, pentingnya pengelolaan sistem pengendalian internal demi mencapai tujuan organisasi dalam menghasilkan kualitas laporan keuangan yang memadai.

Proses pengelolaan keuangan daerah dalam suatu instansi pemerintah daerah harus ditata sedemikian rupa agar menghasilkan suatu pengelolaan keuangan yang efektif dan berkualitas baik. Dalam pengelolaan keuangan tersebut, yang akan nampak dari hasil pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Perwakilan Provinsi Jawa Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2018 kepada Pemerintah Kota Bekasi diterbitkan pada tanggal 28 Mei 2019 Nomor : 27B/SHP/XVIII.BDG/05/2019, BPK memberikan opini Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2018 “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP). Hal ini artinya Pemerintah Kota Bekasi berhasil mempertahankan predikat opini WTP seperti tahun-tahun sebelumnya sehingga target berhasil dicapai dengan capaian 100%.

Adapun BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian internal

dalam penyusunan laporan keuangan pada tahun 2019, antara lain:

- a. Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap belum dilaksanakan secara memadai
- b. Penambahan Anggaran serta Realisasi Belanja Langsung Urusan dan Belanja Langsung Penunjang Urusan Tahun 2018 pada Pemerintah Kota Bekasi tidak didasarkan pada 38 Peraturan Daerah mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Oleh karena itu, dalam penyusunan laporan keuangan yang berlandaskan SAP pentingnya adanya sistem pengendalian internal yang mempengaruhi dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan efisien. Pentingnya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah sangat mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintah tersebut berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Namun, kurangnya pengoptimalan faktor-faktor akan kualitas laporan keuangan tersebut akan menghambat pencapaian tujuan organisasi pemerintahan tersebut.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan dengan dibuktikan oleh penelitian terdahulu, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati et al., (2018) yang menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dalam penelitian ini menambahkan variabel moderasi yaitu sistem pengendalian internal dengan fenomena yang menunjukkan bahwa lemahnya hasil kualitas laporan keuangan daerah kota bekasi sehingga mempengaruhi penerapan standar akuntansi pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi yang kurang memadai. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada BPKAD Kota Bekasi)”**



## **1.2 Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
3. Apakah sistem pengendalian internal dapat memoderasi pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan?
4. Apakah sistem pengendalian internal dapat memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil dari penelitian ini dapat memperkuat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan, serta diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan terhadap literatur-literatur maupun penelitian di bidang Akuntansi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya ilmu pengetahuan, menjadi referensi, dan memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti yang akan datang.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini menambah pengetahuan yang berhubungan dengan kualitas laporan keuangan. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan untuk melatih kemampuan dalam berpikir kritis sekaligus menentukan solusi atas masalah di masa depan.

###### **b. Bagi Pemerintah**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan sumbangan pemikiran untuk perbaikan sekaligus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia khususnya pegawai bidang keuangan instansi pemerintah daerah.

#### **1.5 Batasan Masalah**

Untuk memfokuskan penelitian agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, maka peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut: variabel-variabel yang diteliti yaitu penerapan standar akuntansi pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan

keuangan dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi, dan sampel dalam penelitian ini adalah BPKAD di Kota Bekasi.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini merujuk kepada Pedoman Teknis Penulisan Skripsi yang telah dikeluarkan oleh Fakultas Ekonomi (2021) universitas bhayangkara jakarta raya:

### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi: latar belakang masalah mengenai peran penting laba bagi perusahaan, kaitannya terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi, serta pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi yang didukung dengan beberapa penelitian terdahulu menyangkut kualitas laporan keuangan itu sendiri, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, serta sistematika penulisan.

### **BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat: teori yang relevan dengan masalah yang diteliti yaitu, pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi dan informasi lain yang akan membentuk kerangka teori yang berguna untuk menyusun penelitian ini, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian.

### **BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menguraikantentang desain penelitian, tahapan penelitian, tempat dan waktu, jenis data dan cara pengambilan sampel, metode analisis data, serta teknik pengolahan data yang digunakan.

### **BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN**



Bab ini menguraikan tentang deskripsi hasil penelitian, statistik deskriptif, pengujian hipotesis serta pembahasan.

## **BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, implikasi manajerial, serta saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

